



Buletin Parlementaria

Nomor 1117/III/VIII/2020 • Agustus 2020



DPR Dorong Pemerintah Sigap Lindungi Rakyat



9 772614 339005



7 DPR Minta Pemerintah
Perhatikan Nasib
UMKM saat Pandemi



9 Kemampuan Polri
Tangani Aksi Terorisme
Sudah Mumpuni



Foto bersama Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan DPR RI dan Pimpinan DPD RI sebelum Sidang Bersama DPR-DPD RI, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. Foto: Gerald/MAN

DPR Dorong Pemerintah Sigap Lindungi Rakyat

Pandemi Covid-19 saat ini tidak hanya sebatas permasalahan kesehatan, namun telah mengubah tatanan ekonomi dan sosial di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Pandemi ini telah mengancam kesehatan umat manusia, mendistorsi perekonomian global, dan menurunkan derajat kesejahteraan rakyat, tanpa diketahui kapan ancaman ini akan berakhir. Oleh karena itu, pemulihan di Indonesia pada tahun 2021 dihadapkan pada tantangan yang berat.

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengatakan, pulihnya kehidupan sosial dan perekonomian nasional dari pandemi Covid-19, menjadi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah diharapkan dapat melaksanakan berbagai langkah yang efektif, baik melalui kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta instrumen fiskal maupun moneter, untuk dapat segera mewujudkan

harapan rakyat tersebut.

“DPR RI telah memberikan dukungan kepada Pemerintah dengan menetapkan Perppu 1 tahun 2020 menjadi Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan,” kata Puan pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020–2021 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Melalui UU tersebut, Pemerintah telah diberikan ruang kewenangan yang memadai untuk mengatasi Pandemi covid-19 dan dampaknya. Pemerintah agar dapat melaksanakan amanat UU tersebut secara efektif untuk memperkuat penanganan di bidang kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, serta pelayanan

umum negara. Kinerja Pemerintah semakin dituntut oleh rakyat agar dapat bertindak sigap, cepat, dan terpadu dalam menjalankan berbagai program untuk melindungi rakyat, membantu rakyat, dan memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi rakyat Indonesia.

“Kita menyadari bahwa efek pandemi ini begitu besar terhadap menurunnya derajat kesejahteraan rakyat Indonesia, yang ditandai dengan bertambahnya angka kemiskinan dan pengangguran serta penurunan daya beli masyarakat yang sangat signifikan. Kondisi ini memberikan tekanan yang sangat besar bagi perekonomian nasional kita dan APBN Tahun Anggaran 2021,” jelas politisi PDI-Perjuangan itu.

Sebagai instrumen yang sangat penting dan strategis bagi penyelenggaraan negara untuk mensejahterakan rakyat, maka APBN 2021 agar dapat diarahkan

untuk penguatan bidang kesehatan, pemulihan ekonomi, pemulihan sosial, transformasi strategis, serta penguatan reformasi. APBN Tahun 2021, selain harus mengalokasikan program dan anggaran penanganan Covid-19 dan dampaknya, juga harus memastikan keberlanjutan pembangunan nasional dan pelayanan umum negara.

Hal ini tentunya akan menjadi tantangan bagi Pemerintah, mengingat saat ini penerimaan negara tergerus akibat dampak pandemi Covid-19, sementara belanja negara semakin meningkat. Pada tahun 2021, defisit anggaran diperkirakan akan tetap tinggi, yaitu lebih dari 3 persen terhadap PDB, sejalan dengan kinerja penerimaan yang belum membaik. "Kinerja penerimaan 2021 diprediksi masih akan tetap tertekan dan berimplikasi pada semakin besarnya ketergantungan Pemerintah terhadap instrumen pembiayaan utang sebagai sumber pendanaan APBN untuk menutupi defisit anggaran," imbuh Puan.

RUU APBN Tahun 2021, akan dibahas bersama oleh Pemerintah dan DPR RI. DPR RI dapat memahami beban berat APBN Tahun 2021 dan DPR RI memiliki komitmen yang tinggi, dalam bergotong royong bersama Pemerintah, untuk memformulasikan APBN 2021 yang berkualitas, sebagai

APBN yang dapat melindungi rakyat, memberdayakan rakyat, mensejahterakan rakyat, memajukan Indonesia dan memperkuat persatuan seluruh anak bangsa Indonesia.

Di sisi lain, Puan memastikan, seluruh Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas segera akan diselesaikan pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021. Namun ia menambahkan, penyelesaian semua RUU itu dengan memperhatikan skala prioritas, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hukum nasional. Diakui Puan, pelaksanaan fungsi legislasi DPR terkendala oleh pandemi Covid-19.

"DPR akan menyelesaikan seluruh RUU yang ada dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020, pada masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021, dengan tetap memperhatikan skala prioritas, sehingga kebutuhan hukum bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dipenuhi. DPR juga akan terus melanjutkan pembahasan RUU tentang Cipta Kerja secara cermat, hati-hati, transparan, terbuka, dan terpenting mengutamakan kesinambungan kepentingan nasional," kata Puan. ■ mh/sf



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. Foto: Dep/MAN



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Y.O.I. Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Hasri Mentari

ANGGOTA REDAKSI

Rizka Arinindy, S.Sos. Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Natasya Amanda P. S.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Irandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Pumtho Pranowo, Singih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Riyan Hidayat, Nafisa Hanum Alaydrus, Larissa Amanda Indrianti, Mohammad Rizki Nugraha.

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie.

ANALIS MEDIA

Deprisa Citra Akbari, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widoyowati

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Fajar Suryanto

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Sartomo, S.S., M.Si (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah, Fathurahman

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

FOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Siti Nur Aidah S.A.P., M.AP, Isfandi Mulyana, Yudi Kresna

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana Puspita
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

DPR Serap Masukan MUI Mengenai RUU Ciptaker dan RUU BPIP

DPR RI bersama dengan Pemerintah terus melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang *Omnibus Law* Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin memastikan, pembahasan RUU Ciptaker dibahas secara mendalam dengan melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada.

“RUU ini kita bahas dengan melibatkan seluruhnya, seperti saat ini Majelis Ulama Indonesia juga kita minta masukannya,” papar Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu usai menerima Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (12/8). Turut hadir, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI M Nurdin dan Anggota Baleg DPR RI John Kennedy Azis.

Pembahasan RUU Ciptaker terus dilakukan di Panja Baleg DPR RI secara seoptimal mungkin, sebab adanya pandemi Covid-19 saat ini, masyarakat sangat membutuhkan RUU tersebut. “Yaitu berkaitan dengan penekanan terhadap riset dan inovasi harus, dikuatkan kemudian mengenai tenaga kerja ini seperti sertifikasi halal kita serap masukan dari MUI ini secara tepat,” imbuh politisi Partai Golkar itu.

Azis menambahkan, pertemuan dengan MUI tidak hanya membahas mengenai RUU Ciptaker, namun juga RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). “Tak hanya RUU Ciptaker saja tetapi RUU HIP ini kita minta masukannya apalagi rencananya

akan diubah menjadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP),” jelas Azis.

Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi memastikan pihaknya akan mengawal pembahasan RUU Ciptaker dan RUU BPIP. MUI sebagai bagian dari elemen anak bangsa yang menginginkan negara ini maju, sukses dan jaya dan atas izin Allah menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara industri lainnya di negara ini.

Alasan itulah, sambung Muhyiddin, pihaknya sangat berharap agar masukan-masukan tersebut bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan DPR RI dalam

merumuskan RUU tersebut karena tujuan MUI adalah maju bersama-sama mengawal bangsa dan negara ini.

“Sebagai bukti bahwa MUI memiliki *sense of crisis*, *sense of belonging* dan *sense of responsibility*,” kata Muhyiddin.

Muhyiddin berharap MUI bisa terus memantau perkembangan pembahasan RUU tersebut di DPR. “Apabila memang nanti ada hal hal yang mungkin merugikan rakyat dan mengganggu kedaulatan negara, maka kami tidak segan segan untuk memberikan masukan dan peringatan kepada mereka, mudah-mudahan peringatan ini bermanfaat bagi kita sekalian,” pesannya. ■ *tn/sf*



Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin bertukar cenderamata dengan Wakil Ketua MUI. Foto: Mario/MAN

DPR Terima Laporan Keuangan 2019 dari BPK



Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel bersama Wakil Ketua BPK RI Achsanul Qosasih. Foto: Rifky/MR

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menerima Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. BPK memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada DPR RI. Dengan opini WTP ini, berarti pengelolaan keuangan di DPR RI sangat baik.

Usai penyerahan buku laporan, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (10/8), Gobel menyatakan, DPR harus terus meningkatkan perencanaan anggaran dengan lebih baik, termasuk penggunaannya. Dalam pertemuan tertutup itu, Gobel

didampingi Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara.

“Yang penting dari hasil yang diberikan BPK, kita harus terus meningkatkan kualitas perencanaan yang baik dan penggunaan yang benar. Dengan Kesetjengan nanti kita akan kembangkan. DPR harus menjadi teladan supaya laporannya baik dan penggunaannya juga benar,” tutur politisi Partai NasDem ini.

Sebelumnya, Wakil Ketua BPK RI Achsanul Qosasih yang menyerahkan laporan menyatakan, apa yang sudah dilakukan para wakil rakyat dalam kegiatan reses maupun kegiatan penyerapan aspirasi sudah dijalankan dengan baik. “Atas laporan itu, BPK

”

KITA HARUS TERUS MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN YANG BAIK DAN PENGGUNAAN YANG BENAR. DENGAN KESETJENAN NANTI KITA AKAN KEMBANGKAN. DPR HARUS MENJADI TELADAN SUPAYA LAPORANNYA BAIK DAN PENGGUNAANNYA JUGA BENAR

memberikan opini WTP. Dan apa yang dilakukan teman-teman di parlemen, baik kegiatan reses, menyerap aspirasi sudah dijalankan dengan baik, sesuai dengan aturan yang ada,” jelasnya.

Achsanul juga berharap agar DPR sebagai lembaga pengawas dan BPK sebagai pemeriksa bisa bekerja sama lebih erat dalam mengawasi keuangan negara. Semua ini, katanya, untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat. “Mudah-mudahan ke depan antara BPK sebagai pemeriksa dan DPR sebagai lembaga pengawas bisa bekerja sama lebih erat untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,” tutup Achsanul.

■ mh/sf

Sufmi Dasco Apresiasi Pemerintah Bantu UMKM

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi langkah cepat Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dalam waktu dekat akan mengupayakan untuk merealisasikan program bantuan uang tunai senilai Rp 2,4 juta per pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

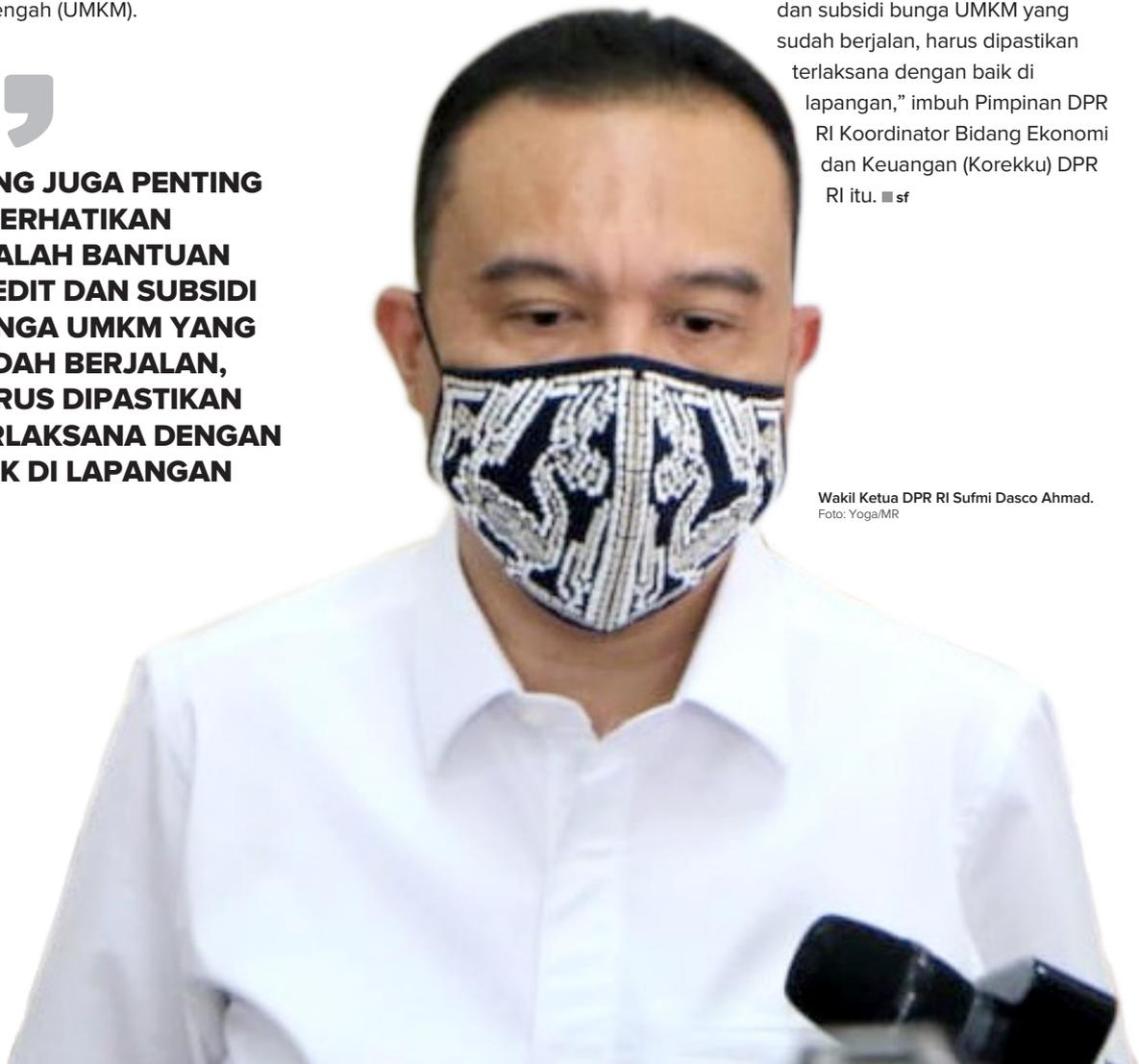
“Kami pikir, sektor UMKM ini, terutama sektor informal sangat mendominasi struktur perekonomian Indonesia. Data tahun 2019 menunjukkan, sektor UMKM menyumbang 60,34 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) kita,” kata Dasco dalam siaran pers yang diterima *Parlementaria*, Rabu (12/8)

Politisi Partai, Gerindra itu berharap, dengan alokasi anggaran dana sebesar Rp 28,8 triliun untuk 12 juta penerima bantuan ini, bisa dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM sebagai modal usaha di masa pandemi Covid-19 ini dan mampu menggerakkan roda perekonomian secara optimal.

“Kemudian, yang juga penting diperhatikan adalah bantuan kredit dan subsidi bunga UMKM yang sudah berjalan, harus dipastikan terlaksana dengan baik di lapangan,” imbuh Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) DPR RI itu. ■ sf

”

YANG JUGA PENTING DIPERHATIKAN ADALAH BANTUAN KREDIT DAN SUBSIDI BUNGA UMKM YANG SUDAH BERJALAN, HARUS DIPASTIKAN TERLAKSANA DENGAN BAIK DI LAPANGAN



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Foto: Yoga/MR

DPR Minta Pemerintah **Perhatikan** Nasib UMKM saat Pandemi

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul

Muhaimin Iskandar mengatakan, pelambatan ekonomi pada triwulan II 2020 yang minus 5,32 persen tampaknya sudah menjadi lampu merah buat pemerintah. Ia menegaskan, jika tidak hati-hati dan tidak segera mengambil langkah-langkah tepat dan strategis dalam pemulihan ekonomi, maka tidak menutup kemungkinan ekonomi Indonesia akan masuk resesi.

“Tantangan yang harus kita lakukan adalah segera melakukan terobosan-terobosan dalam menggerakkan ekonomi sehingga kita semua mampu membalikkan pelambatan menjadi pertumbuhan,” ucap pria yang akrab disapa Gus Ami itu dalam keterangan persnya, Rabu (12/8).

Gus Ami memaparkan, Badan Pusat Statistik (BPS) telah mencatat bahwa konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi salah satu penyangga dan penggerak pertumbuhan ekonomi telah berkontraksi atau mengalami pelambatan 6,51 persen. Di sisi lain, tabungan masyarakat di perbankan nasional justru meningkat, dimana kelas menengah yang jumlahnya sekitar 115 juta merasakan ketidakpastian sehingga mereka menyimpan uang mereka di bank. Ini jelas sesuatu yang paradoks.

“Salah satu langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk menggerakkan perekonomian nasional adalah melalui penciptaan lapangan kerja. Di sinilah saya kira pemerintah harus benar-benar memperhatikan nasib UMKM di masa pandemi ini,” tegasnya.

Menurutnya, UMKM yang saat ini jumlahnya mencapai 64 juta ini adalah



Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. Foto: Oji/IMAN

sektor yang paling terdampak saat pandemi Covid-19 ini. Pemerintah perlu memperhatikan nasib UMKM karena selama ini UMKM telah menjadi penyangga masalah ketenagakerjaan di Indonesia.

Ia menyatakan, UMKM telah mendonorkan tenaga kerja yang tidak sedikit sehingga ia mampu meningkatkan konsumsi rumah tangga yang merupakan penopang utama pertumbuhan ekonomi. “Jangan lupa, selama ini UMKM telah menjadi katub pelampung masalah ketenagakerjaan. Di saat ekspor terbatas, maka tumpuan utama adalah usaha di dalam negeri dan itu adalah sektor UMKM,” tandas politisi Fraksi PKB tersebut.

Karena itu, sambung Gus Ami, saat pandemi, dimana seluruh sektor ekonomi bergerak lambat, maka hanya ada satu cara yang bisa dilakukan yakni fokus pada pengembangan sektor yang mampu

memberi efek pada orang banyak dan menciptakan lapangan kerja. Maka kehadiran negara untuk betul-betul memperhatikan sektor UMKM melalui stimulus-stimulus serta kebijakan yang berpihak pada mereka menjadi sesuatu yang tak bisa ditawar.

Lebih lanjut Muhaimin menuturkan, pilihan terhadap strategi pengembangan UMKM sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang berkualitas menjadi keniscayaan. Hal ini karena dalam sejarah UMKM lah sebagai sektor yang mampu bertahan di saat krisis. UMKM terbukti mampu menangkal dampak buruk krisis global.

“Di era ekonomi digital ini, UMKM-UMKM mau tak mau harus didorong untuk masuk pasar digital. Ceruk pasar ini masih terbuka sangat lebar. Dari sekitar 60 jutaan UMKM di Indonesia, baru sekitar 3,379 juta UMKM yang masuk pasar digital. Artinya baru sekitar 8 persen,” imbuh Gus Ami. ■ dep/es

Perlunya Pembentukan Lembaga Peradilan Pemilu

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo menyampaikan tentang pentingnya pembentukan Lembaga Peradilan Pemilu, mengingat banyaknya masalah yang kerap terjadi dalam pelaksanaan Pemilu. Tak hanya menyangkut pelanggaran pidana dalam Pemilu, lembaga ini juga kelak akan mengatur hukum politik Indonesia.

Dalam salah satu acara diskusi Webinar Taruna Merah Putih yang disiarkan secara langsung, pada hari Minggu (9/8), Arif memaparkan mengenai fungsi dan tugas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Dikatakannya, DKPP merupakan suatu lembaga adjudikasi Pemilu yang sifatnya hanya mengadili etik terkait Pemilu.

“Saya ingin mengatakan DKPP memang dibatasi menjadi semacam lembaga adjudikasi, hanya untuk peradilan etik saja, lebih dari peradilan etik tidak dimungkinkan. Karena dalam undang-undang sudah mengatur kalau ada masalah dalam hal pelanggaran sifatnya administratif, disampaikan oleh pihak mana, bagaimana hukumnya, dan seterusnya. Tidak menyangkut pelanggaran pidana dan sebagainya,” ucapnya.

Karena DKPP sifatnya hanya mengatur etik saja, sambungnya, maka kemungkinan diperlukan pembentukan lembaga peradilan Pemilu yang akan mengatur hukum politik Indonesia. “Saya kira ke depan soal DKPP yang kemudian hari-hari ini isunya didorong, karena memang UU sudah menyediakan UU 10 Tahun 2016, agar ke depan jika



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo. Foto: Andri/MR

”

**DKPP MERUPAKAN
SUATU LEMBAGA
AJUDIFIKASI PEMILU
YANG SIFATNYA
HANYA MENGADILI
ETIK TERKAIT PEMILU**

memungkinkan, dan ini tentu bagian politik hukum kita ke depan adalah mengenai pembentukan Lembaga Peradilan Pemilu,” kata Arif.

Menurutnya, masih diperlukan pembahasan lebih lanjut terkait wacana ini. Ia juga mengimbau agar Indonesia mencontoh negara-negara yang telah menerapkan sistem lembaga peradilan Pemilu. “Problem etik yang terjadi pada penyelenggara memang diadili DKPP, dimana unsur di dalamnya adalah pihak penyelenggara, dan lainnya tokoh masyarakat untuk menguji apakah penyelenggara itu bisa dibuktikan secara hukum, dan memang tidak diberikan ruang pada pelanggaran bukan etik, inilah saya kira penting kita bicara lebih lanjut tentang keberadaan DKPP,” ujarnya. ■ dep/es

Kemampuan Polri Tangani Aksi Terorisme Sudah Mumpuni

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai selama ini kemampuan Polri sudah cukup baik dan mumpuni dalam menangani serta mengatasi aksi terorisme yang terjadi di Indonesia. Jika ingin turut melibatkan Polri, Sahroni mengatakan cukuplah pada kasus-kasus tertentu saja.

“Kalau mau melibatkan TNI dalam penanganannya, Perpres seharusnya pada kasus-kasus tertentu saja,” kata Sahroni dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (11/8). Dikatakannya, hal itu terkait dengan langkah pemerintah yang sedang membahas Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelibatan TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme.

Sebagai kasus kejahatan luar biasa, sambung Sahroni, aksi terorisme memang memerlukan pendekatan yang beragam. Sahroni mengatakan, di Indonesia aksi terorisme adalah kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*. Oleh karenanya, dalam upaya penanggulangannya dibutuhkan berbagai macam pendekatan.

“Pendekatannya bukan hanya masalah keamanan, melainkan juga ada aspek psikologis, sosial, ekonomi, dan lain-lain,” ujarnya.

Politikus Partai NasDem itu mengutarakan, sejauh ini penanganan yang terkait dengan kasus

”

DALAM MEMBUAT PERPRES TERSEBUT, PEMERINTAH SUDAH MELAKUKAN PERTIMBANGAN DAN MEMINTA MASUKAN DARI BERBAGAI PIHAK SECARA MATANG SEHINGGA TIDAK AKAN TUMPANG-TINDIH

terorisme di Tanah Air masih banyak yang berada di bawah kepolisian. Ia tidak mengkhawatirkan terjadinya persinggungan wewenang antara TNI dan Polri dalam menangani isu terorisme. “Dalam membuat perpres tersebut, pemerintah sudah melakukan pertimbangan dan meminta masukan dari berbagai pihak secara matang sehingga tidak akan tumpang-tindih,” katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan, rancangan Perpres terkait hal ini sudah disampaikan ke Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly dan ke DPR RI. ■ dep/es

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Foto: Oji/MR



Penataan *Landscape* Laut Harus Indah



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Cirebon, Jawa Barat. Foto: Eko/MR

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menegaskan penataan infrastruktur pantai dan seluruh kawasan laut harus memperhatikan segi estetika. Menurutnya yang dibutuhkan kawasan pantai Kota Cirebon, Jawa Barat, adalah pantai yang indah dan cantik yang dapat menjadi daya tarik kunjungan wisatawan ke Kota Udang ini.

Dedi menjelaskan, selama ini manusia senantiasa mengagumi laut. “Kita mengagumi laut, mencintai laut, banyak hidup dari laut, tapi jujur sampai dengan hari ini kita, termasuk saya, belum memuliakan laut,” paparnya saat memimpin Kunjungan Kerja Reses

Komisi IV DPR RI ke Cirebon, Jawa Barat, Senin (10/8).

Menurut politisi Fraksi Partai Golkar tersebut, kondisi ini sudah terlihat dari aliran sungai yang dijadikan tempat sampah. Lalu muara sungai ada di laut. Selain itu hingga kini Indonesia belum memiliki *landscape* laut. “Makanya setiap orang berdasarkan kehendaknya masing-masing, menurut versi mereka,” keluhnya.

Dedi menjabarkan, jika menginginkan pantai yang cantik dan indah, maka harus dibuatkan desain yang juga indah, memiliki nilai estetika ibarat seorang dewi cantik. “Perubahan merek kawasan pantai juga perlu dilakukan untuk menarik minat wisatawan. Di lain tempat tidak boleh

ada bangunan yang kumuh, tata letak yang baik sehingga laut bisa menyegarkan semua orang,” jelas mantan Bupati Purwakarta itu.

Wali Kota Cirebon Eti Herawati mengungkapkan, dengan kedatangan Tim Kunker Komisi IV DPR RI ini, ia sangat berharap pembangunan kawasan pantai, termasuk Kejawanan bisa terlaksana dengan baik. Peralisnya, kata dia, Kota Cirebon yang hanya memiliki panjang pantai 7 km membutuhkan penataan kawasan pantai. “Saya sangat apresiasi kerja Komisi IV DPR RI ini. Kalau kita melihat potensi yang ada di Kejawanan ini luar biasa, ekspornya tidak saja untuk kebutuhan lokal, ini bisa ekspor ke mancanegara juga,” ungkap Eti. ■ eko/sf

Kelangkaan Pupuk Harus Segera Diatasi

Petani masih menghadapi banyak permasalahan. Mulai dari kelangkaan pupuk, serta minimnya saluran irigasi dan permodalan. Anggota Komisi IV DPR RI Nur'aeni menyebut bahwa persoalan subsidi pupuk ialah karena kurangnya anggaran, dan juga *timing* distribusi pupuk yang tidak tepat. Di saat musim tanam, pupuk malah tidak ada. Kementerian Pertanian pun telah merealokasi anggaran subsidi pupuk.

Hal ini Agar tidak ada lagi kelangkaan pupuk yang terjadi. “Semoga dengan adanya realokasi ini, pupuk Indonesia segera mengupayakan dan bisa menjawab masalah kepada kelompok pertanian (poktan). Jadi jangan terlalu kaku untuk merealokasi

ini, jangan menunggu sampai akhir tahun. Sedangkan petani untuk saat-saat ini sangat membutuhkan,” katanya usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI dengan kelompok tani di Desa Singarajan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Selasa (11/8).

Nur'aeni menambahkan, Komisi IV DPR RI bersepakat, bahwa Pemerintah harus bisa memberikan insentif maupun bantuan-bantuan lain, sehingga bantuan tidak *melulu* dalam bentuk pupuk, walaupun ke depan meminta subsidi pupuk juga harus ditingkatkan. Di sisi lain, pihaknya juga terus mendorong Pemerintah untuk meningkatkan harga gabah petani agar harga nilai tukar petani (NTP) meningkat.

“Sampai saat ini, harga gabah di saat panen tidak mengalami lonjakan yang signifikan, karena harga dan juga petani kita lebih mengandalkan sistem bayar panen. Petani sendiri tidak dapat apa-apa untuk mendapatkan nilai lebih dari sisi ekonomi. Ke depan akan dipikirkan kembali, bagaimana tidak hanya memikirkan subsidi *outcome* saja, tetapi *output*-nya ke petani itu sendiri,” papar politisi Partai Demokrat ini.

Legislator dapil Banten II itu berharap ke depan insentif dan subsidi yang diberikan Pemerintah untuk petani sifatnya bisa langsung diberikan kepada petani tersebut, tidak ada lagi melalui perantara ataupun calo-calo liar yang akhirnya merugikan petani. “Ke depan harus tepat sasaran,” tutup Nur'aeni. ■ azk/sf



Anggota Komisi IV DPR RI Nur'aeni saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Serang, Banten. Foto: Azka/MR

Jangan Masukkan BUMN Pariwisata ke *Holding* Aviasi

Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty menyarankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pariwisata sebaiknya tidak dimasukkan ke *holding* BUMN penerbangan atau aviasi. Ia menilai bahwa kedua sektor industri BUMN penerbangan dan pariwisata memiliki perbedaan, karena tidak seperti *Holding Pupuk* atau Perkebunan atau Semen yang relatif seragam.

“Saya berpendapat sebaiknya BUMN pariwisata tidak digabungkan dengan (*holding Aviasi*) sebab implementasi kerjanya berbeda,” ujar Evita dalam keterangan tertulis yang diterima **Parlementaria**, Rabu (12/8).

Industri pariwisata memiliki peran besar dalam pembangunan Indonesia, posisinya merupakan sektor terbesar kedua dalam menghasilkan devisa maupun total *revenue*.

“Alangkah baiknya (BUMN) pariwisata dijadikan *holding* tersendiri, kita butuh konsolidasi, kita butuh pariwisata tetap di depan. Alasannya pariwisata adalah lokomotif pembangunan ekonomi dan sektor lainnya,” kata politisi PDI-Perjuangan ini.

”

SAYA BERPENDAPAT SEBAIKNYA BUMN PARIWISATA TIDAK DIGABUNGKAN DENGAN (HOLDING AVIASI) SEBAB IMPLEMENTASI KERJANYA BERBEDA



Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty. Foto: Geraldi/MR

Lebih lanjut legislator dapil Jawa Tengah III tersebut mengatakan bahwa dengan demikian sektor pariwisata harus didukung semua sektor transportasi, termasuk oleh sektor penerbangan mengingat hal ini memang diperlukan untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia yang memang mengandalkan pariwisata.

Ia juga mengatakan bahwa salah satu alasan untuk menggabungkan BUMN pariwisata masuk *Holding Aviasi* adalah untuk menggaet pasar yang lebih luas, namun dengan menjadi *holding* tersendiri pun upaya BUMN pariwisata meraih pasar yang lebih luas bisa dilakukan. Evita juga berharap BUMN pariwisata bisa makin bebas bergerak dan inovatif dalam menghadapi tantangan regional dan global yang makin kompetitif.

Hal ini tentu bertentangan dengan pendapat para pakar. Sebelumnya Pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai positif wacana untuk menyatukan BUMN penerbangan dan pariwisata. Menurut Direktur Eksekutif Core itu, sektor penerbangan mempunyai implikasi yang penting bagi perkembangan pasar wisata.

Penerbangan juga membuka peluang bagi peningkatan sektor-sektor ekonomi yang berhubungan dengan kepariwisataan. Maka itu, lanjutnya, sektor penerbangan dan pariwisata harus dapat lebih terintegrasi agar dapat saling mendukung mengingat hubungan sektor itu berlaku dua arah dimana keduanya saling mempengaruhi. ■ **er/sf**

Jadikan Peringatan Harteknas Momentum Evaluasi Capaian Riset dan Inovasi Nasional

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto berharap Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) yang diperingati setiap 10 Agustus dijadikan momentum untuk mengevaluasi terhadap pencapaian riset dan inovasi nasional agar ke depan bisa lebih kreatif dalam membuat terobosan agar lebih mampu bersaing di kancah internasional.

“Peringatan itu harus dijadikan pemacu dan pemicu lahirnya hasil riset dan inovasi yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset Inovasi Nasional (Kemristek/BRIN), harus kreatif membuat berbagai terobosan baru agar penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan riset dan inovasi terus berkembang,” ujar Mulyanto dalam siaran persnya, Senin (10/8).

Dilanjutkannya, sebagai sebuah bangsa, kita patut bangga dengan beragam pencapaian hasil riset dan inovasi yang sudah dihasilkan. Secara kualitas terbukti hasil riset dan inovasi anak bangsa mampu bersaing di kancah internasional. Oleh karena itu diperlukan dukungan yang konsisten dari Pemerintah agar keberhasilan yang sudah diraih dapat dikembangkan.

Belakangan Mulyanto memandang pemerintah seperti tidak serius membangun program inovasi teknologi nasional sebagai dasar keunggulan kompetitif bangsa, baik dari aspek pendanaan maupun kelembagaannya. Hal ini tercermin dengan belum adanya kejelasan akan terbentuknya kelembagaan BRIN hingga hari ini.

Padahal, pemerintah berjanji akan menerbitkan Perpres tentang Kelembagaan BRIN di akhir tahun 2019, namun sampai memasuki semester II Tahun 2020 pun, Perpres yang dimaksud tak kunjung muncul.

“Tanpa ada kejelasan bentuk kelembagaan, dikhawatirkan akan mengganggu kegiatan riset yang selama ini berjalan. Program riset dan inovasi yang sudah direncanakan terancam tidak terlaksana karena tidak jelasnya aspek kelembagaan,” tegas politisi dari Fraksi PKS ini.

Doktor nuklir lulusan Tokyo Technology Institute ini menilai penundaan tersebut mencerminkan pemerintah tidak punya *political will* untuk membangun inovasi nasional. Semestinya, sesuai fatsun yang ada, pemerintah tidak menunda

selama ini. Ini tentu menghambat kerja pembangunan riset dan inovasi nasional. Tidak heran jika kemudian di kalangan peneliti senior, muncul kegamangan mengenai ketidakjelasan eksistensi lembaga mereka, termasuk kesan politisasi lembaga inovasi.

Tidak hanya itu, terkait dengan anggaran litbang, Mulyanto juga menyoroti lemahnya dukungan pemerintah. Untuk riset vaksin Covid-19 misalnya, melalui Konsorsium Riset Nasional, ternyata hanya dialokasikan dana litbang sekitar Rp 20 miliar. Hal ini menurutnya belum seberapa dibanding dana pengembangan vaksin Covid-19 yang dimiliki Sinovac asal China. Karenanya jangan heran jika akhirnya nanti bangsa ini merogoh kocek triliunan rupiah untuk membeli vaksin impor dari Cina itu. ■ ayu/es



Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: Azka/MR

Pemerintah Diminta Turut Terapkan Inpres Nomor 6 Tahun 2020

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 meminta kepala daerah melakukan sosialisasi masif terkait protokol kesehatan dan mengenakan sanksi bagi yang tidak menaatinya. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani berharap Pemerintah tidak hanya berwacana, tetapi juga memberikan keteladanan.

“Bagaimana masyarakat mau taat dan disiplin jika mereka tahu para pejabat justru mendapat dispensasi. Masyarakat dilarang bepergian, tapi para pejabat sudah mulai sibuk kunjungan kerja. Masyarakat dilarang berkerumun, para pejabat sudah mulai rapat dan lobi-lobi, bahkan menyelenggarakan resepsi pernikahan. Masyarakat diminta pakai masker, tapi banyak pejabat yang fotonya beredar di medsos dan layar kaca tanpa masker,” ujar Netty melalui rilis yang diterima *Parlementaria*, Kamis (6/8).

Oleh karena itu, kata Netty, sangat tidak masuk akal menerapkan sanksi kepada masyarakat, sementara

Pemerintah belum menyiapkan infrastrukturnya dengan baik. Fasilitas protokol kesehatan seperti masker dan tempat cuci tangan di tempat umum harus tersedia. Harus dipastikan ada penanda jaga jarak di setiap lokasi, serta petugas yang mengukur suhu dan memastikan jumlah orang separuh dari kapasitas, dan sebagainya.

“Jangan sampai rakyat diberi sanksi tapi kantor Pemerintah, pengelola tempat publik dan perusahaan tidak dipaksa untuk menyediakan fasilitasnya,” ungkap politisi PKS itu. Selain itu, kata Netty, pemberian sanksi saat ini sudah terlambat. Penerapan sanksi seharusnya diberlakukan seiring diterapkannya *new*

normal yang merelaksasi aktivitas masyarakat. Sekarang masyarakat cenderung merasa aman dan mulai mengabaikan protokol kesehatan, jika tiba-tiba diberi sanksi akan kaget dan malah kontraproduktif.

Soal jenis sanksi, Netty juga tidak setuju jika dalam bentuk denda uang yang pasti menambah beban masyarakat. “Untuk bertahan hidup saja, masyarakat masih kembang kempis, apa lagi untuk bayar denda. Pemda harus kreatif memikirkan bentuk sanksi yang edukatif setelah sebelumnya melakukan sosialisasi dan menunjukkan keteladanan para pejabat publiknya,” tutup legislator dapil Jawa Barat VIII itu. ■ rmm/sf

Anggota Komisi IX DPR RI
Netty Prasetiyani. Foto: Jaka/MR

”

JANGAN SAMPAI RAKYAT DIBERI SANKSI TAPI KANTOR PEMERINTAH, PENGELOLA TEMPAT PUBLIK DAN PERUSAHAAN TIDAK DIPAKSA UNTUK MENYEDIAKAN FASILITASNYA



Optimalisasi PJJ, Anggaran POP Bisa Dialihkan Pengadaan Jaringan Internet

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengusulkan anggaran Program Organisasi Penggerak (POP) dialihkan untuk menambah *hotspot* jaringan internet. Hal itu akan lebih berguna untuk mengoptimalkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) daring bagi siswa maupun mahasiswa.

“Daripada bikin ribut dan gaduh, alihkan saja anggaran (POP) setengah triliun itu untuk 52,5 juta pelajar dan mahasiswa di seantero negeri ini agar gratis mengakses pembelajaran daring,” kata Abdul Fikri dalam siaran pers yang diterima *Parlementaria*, Kamis (6/8).

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu mengusulkan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) POP diganti dengan program penambahan *hotspot* internet gratis. Diharapkan *hotspot* tersebut ada di setiap RW, atau paling tidak ada di setiap kantor desa atau kelurahan. Di tempat-tempat *hotspot* itulah nantinya siswa maupun mahasiswa dapat belajar secara daring, dengan tetap menerapkan protokol pencegahan Covid-19.

Teknis pelaksanaannya bisa dijadwal secara bergilir per jenjang untuk menghindari kerumunan. “Idealnya di setiap RW ada, atau di-*split* lagi menjadi beberapa titik, misalnya setiap RT ada *hotspot*. Hal ini bisa saja kombinasi antara dana Pemerintah sebagai stimulus, dengan swadaya masyarakat di lingkungannya,” ujarnya.

Namun Fikri menegaskan, pengalihan anggaran dalam DIPA harus melalui proses pembahasan anggaran dengan DPR. Walaupun kenyataannya



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. Foto: Jaka/MR

”

IDEALNYA DI SETIAP RW ADA, ATAU DI-SPLIT LAGI MENJADI BEBERAPA TITIK, MISALNYA SETIAP RT ADA HOTSPOT

banyak DIPA yang diubah tanpa pelibatan dan persetujuan DPR dengan alasan darurat masa pandemi Covid-19. “Kita DPR menolak cuma jadi penonton saja atas semua kebijakan anggaran. Jadi fungsi anggaran DPR

akan tetap kami perjuangkan atas nama konstitusi UUD 1945, termasuk mengubah DIPA,” tandas legislator dapil Jawa Tengah IX itu.

Sementara terkait dengan POP, ia meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menundanya. Pasalnya program dengan anggaran mencapai Rp 595 miliar itu dianggap malah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Apalagi banyak kelompok masyarakat memprotes program itu terkait soal transparansi dan akuntabilitas. Bahkan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengundurkan diri setelah dinyatakan lolos verifikasi. ■ hs/sf

Daerah Diminta **Kembangkan** Konsep *Sport Tourism*



Anggota Komisi X DPR RI A.S Sukawijaya. Foto: Jaka/MR

Anggota Komisi X DPR RI A.S Sukawijaya meminta daerah-daerah yang nantinya ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun 2021 untuk mempersiapkan konsep *sport tourism*. *Sport tourism* secara harfiah merupakan kegiatan pariwisata yang dipadukan dengan kegiatan olahraga. Dalam hal ini, daerah menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2021 diminta menggenjot sektor pariwisata supaya penonton yang hadir mampu menikmati sepak bola sambil berwisata.

“Selain infrastruktur Piala Dunia yang harus diperhatikan, saya sebagai

Anggota Komisi X mengimbau kepada daerah-daerah yang ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk mempersiapkan sektor pariwisata. Jadi para penonton yang hadir bisa nonton bola sekaligus piknik,” ujar Yoyok Sukawi, sapaan akrab A.S Sukawijaya melalui keterangan tertulis yang diterima *Parlementaria*, Rabu (12/8).

Sejauh ini, PSSI sendiri sudah menetapkan enam daerah untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 yakni Palembang, Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya, dan Bali. Dari enam daerah ini, setiap daerah memang memiliki identitas pariwisata tersendiri yang berpotensi menghasilkan devisa

”

SELAIN INFRASTRUKTUR PIALA DUNIA YANG HARUS DIPERHATIKAN, SAYA SEBAGAI ANGGOTA KOMISI X MENGIMBAU KEPADA DAERAH-DAERAH YANG DITUNJUK MENJADI TUAN RUMAH PIALA DUNIA UNTUK MEMPERSIAPKAN SEKTOR PARIWISATA

dan menggerakkan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di tengah bergulirnya *event* Piala Dunia U-20.

“Istilahnya menggabungkan olahraga sama pariwisata. Kekayaan alam, budaya, serta kuliner di Indonesia begitu banyak dan itu harus dimanfaatkan ketika ada *event* internasional seperti Piala Dunia yang bisa jadi ajang mempromosikan pariwisata Indonesia,” imbuh politisi Fraksi Partai Demokrat ini. Meski demikian, keputusan final soal tempat penyelenggaraan Piala Dunia U-20 akan ditentukan langsung oleh FIFA yang dalam waktu dekat ini akan berkunjung ke Indonesia. ■ hs/sf

Pemerintah Perlu Ambil Langkah Taktis **Hadapi** Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara meminta Pemerintah mengambil langkah taktis dan strategis untuk merespon pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II 2020 yang minus 5,32 persen (year on year/yoy). Amir menilai, pertumbuhan ekonomi yang negatif ini merupakan yang pertama kalinya sejak periode 1998 atau ketika Indonesia mengalami krisis finansial.

“Pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi atau minus ini menjadi PR bagi Pemerintah untuk segera ambil langkah taktis dan strategis. Agar bagaimana di kuartal III tidak sampai mengalami kontraksi lagi, karena jika sampai terjadi kontraksi di kuartal III, Indonesia akan mengalami resesi ekonomi,” ujar Amir dalam rilis yang diterima *Parlementaria*, Selasa (11/8).

Untuk mengantisipasi terjadi resesi ekonomi, Amir mendorong Pemerintah untuk menumbuhkan daya beli masyarakat. Salah satunya dengan menaikkan pendapatan tidak kena pajak (PTKP) dan mengefektifkan bantuan sosial

(bansos) kepada masyarakat, namun dengan tetap fokus mencegah penyebaran wabah Covid-19. “Program tersebut harus dikembangkan pemerintah secara dinamis karena jika daya beli masyarakat meningkat, maka ekonomi akan tumbuh,” sambungnya.

Pemerintah dinilai juga perlu melokalisasi sektor-sektor bisnis yang paling elastis dan tidak banyak terintegrasi dengan sistem global untuk menjadi bantalan penangkal krisis. Sektor tersebut adalah usaha

mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dinilai sangat tepat karena banyak mengandalkan pasar domestik.

“Selain itu, mempertajam stimulus fiskal dengan mempermudah pendaftaran insentif pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu (tax holiday) dan keringanan pajak (tax allowance). Hal ini untuk meng-cover perusahaan baik kelas menengah, kecil maupun besar,” pungkas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu. ■ *hs/sf*

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI
Amir Uskara. Foto: Ariel/MR



Libatkan Pemda dalam Mendefinisikan Kawasan Strategis

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menegaskan pemerintah daerah (pemda) harus dilibatkan dalam mendefinisikan kawasan strategis. Menurutnya, keterlibatan pemda tersebut menjadi penting agar tidak terjadi tumpang tindih definisi dan dapat tercapainya kesepahaman antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Pemaparan tersebut disampaikan Firman dalam Rapat Panja RUU Cipta Kerja (Ciptaker) Baleg DPR RI dengan perwakilan pemerintah diantaranya Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian dan DPD RI, di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/8).

“Ketika kita bicara tentang definisi kawasan strategis, maka keterlibatan itu harus ada hulu-hilirnya. Tentunya, keterlibatan pemerintah daerah menjadi penting. Tujuannya, agar jangan sampai nanti posisi-posisi yang telah ditetapkan pemerintah pusat ternyata di daerah faktanya lain,” ujar Firman.

Terkait hal itu, politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menyatakan penetapan definisi kawasan strategis harus berkaca dari UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang juga akan diharmonisasi dalam RUU Cipta Kerja. Yang mana terdapat 3,5 juta hektar yang saat ini terjadi *overlapping*.

“Di sana ternyata sudah ada penduduk, di sana sudah ada

”

KETIKA KITA BICARA TENTANG DEFINISI KAWASAN STRATEGIS, MAKA KETERLIBATAN ITU HARUS ADA HULU-HILIRNYA

ijin pembangunan setengah jalan, kemudian tiba-tiba muncul UU Nomor 41, mengklaim itu kawasan hutan. Kebijakan inilah yang juga akan diharmonisasi di RUU Cipta Kerja ini. Berkaca dari itulah, keterlibatan daerah dalam definisi kawasan strategis akan semakin paripurna dalam RUU Ciptaker ini,” pungkas Firman. ■ pun/es

Anggota Baleg DPR RI
Firman Soebagyo.
Foto: Gerald/1MR



Kurikulum Pendidikan Harus **Disesuaikan** dengan Pandemi Covid-19

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono berharap

Pemerintah memberikan perhatian serius terhadap proses pembelajaran di tengah pandemi Covid-19 dengan mengusulkan kurikulum pendidikan disesuaikan dengan situasi pandemi. Kualitas kurikulum adalah hal yang sangat penting guna menjaga kualitas SDM Indonesia di masa mendatang.

“Jangan mengejar kuantitas, kita juga harus mengejar kualitas kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi sekarang ini,” kata Ibas, sapaan akrab Edhie Baskoro dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/8).

Ibas menekankan pentingnya infrastruktur yang menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ), tujuannya agar para pelajar yang belajar dari rumah tidak menemui kendala dalam menyerap ilmu pengetahuan. Selain itu, menurut dia, perlu juga dibuatkan kelas-kelas khusus melalui grup kecil, pendistribusian pekerjaan rumah bisa melalui pos bagi siswa dan siswi yang belum memiliki fasilitas jaringan internet atau WiFi juga perlu diperhitungkan.

“Pemerintah pusat maupun daerah perlu memberikan beasiswa kepada siswa dan siswi dari kalangan tidak mampu, karena masyarakat tentu sedang mengalami kesulitan akibat

dampak pandemi Covid-19,” ujar politisi Fraksi Partai Demokrat itu. Ia berharap murid-murid untuk tetap semangat belajar walaupun sedang diterpa pandemi Covid-19 dan harus tetap aktif berkarya serta berprestasi.

Selain itu, Ibas mengatakan masih banyak murid yang belum beruntung menikmati fasilitas, seperti jaringan internet yang memadai, laptop maupun kuota internet terlebih di daerah-daerah pedalaman. “Penting bagi adik-adik terus memperkuat wawasan dan mempromosikan nilai kebangsaan, kemanusiaan dan persatuan khususnya di masa pandemi Covid-19,” pesan Anggota Komisi VI DPR RI itu.

■ hs/sf

”

PEMERINTAH PUSAT MAUPUN DAERAH PERLU MEMBERIKAN BEASISWA KEPADA SISWA DAN SISWI DARI KALANGAN TIDAK MAMPU, KARENA MASYARAKAT TENTU SEDANG MENGALAMI KESULITAN AKIBAT DAMPAK PANDEMI COVID-19



Wakil Ketua Banggar DPR RI Edhie Baskoro Yudhono. Foto: Andri/MAN

Syarat Pilkada, Legislator Usul Anggota Parlemen Tidak Perlu Mundur



Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan. Foto: Ojji/MR

Tim Kuasa DPR RI memberikan keterangan untuk Perkara Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (UU Nomor 10 Tahun 2016) terhadap UUD NRI 1945.

Uji materiil terkait dengan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur persyaratan mundurnya anggota DPR, DPD, dan

DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan Pilkada. Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan mewakili Tim Kuasa DPR RI mengusulkan anggota Parlemen seharusnya cukup diberikan cuti saja ketika mencalonkan diri saat Pilkada.

Lebih lanjut, politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tersebut menuturkan sejumlah alasan yang menjadi landasan mengapa tidak perlu seorang anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk mundur. Yakni salah satunya, ungkap Arteria, keanggotaan DPR, DPD, dan DPRD diatur dengan UU sendiri.



UU-NYA Masing-masing diharuskan untuk mundur sebagai bentuk untuk menjaga netralitasnya sebagai pejabat profesional dari politik praktis

“Yaitu, UU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019. Serta, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015,” ujar Arteria saat menyampaikan pendapatnya mewakili Tim Kuasa DPR RI di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (12/8).

Terkait dengan UU *a quo* yang diujikan, Arteria menegaskan pada prinsipnya ia selaku Anggota DPR RI pembahas UU *A quo* (Komisi II periode itu) menekankan bahwa sikap Fraksi-Fraksi di DPR RI pada saat itu konsisten untuk tidak menerima Putusan MK No.33/PUU-XIII/2015.

“Hal ini jelas berbeda dengan TNI, Polri, PNS, Kepala Desa atau sebutan lain serta pegawai/pejabat pada BUMN atau BUMD menurut UU-nya masing-masing diharuskan untuk mundur sebagai bentuk untuk menjaga netralitasnya sebagai pejabat profesional dari politik praktis,” tandas Arteria. ■ pun/sf

Sidang Tahunan 2020 akan Tegakkan Protokol Kesehatan

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar meyakini pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka peringatan HUT ke-75 RI, dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada 14 Agustus 2020 mendatang, akan menegakkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Hal tersebut disampaikan Indra saat rapat persiapan Sidang Tahunan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (10/8).

“Saya pastikan bahwa DPR akan laksanakan protokol kesehatan dengan tegas. Itu menjadi satu keharusan mutlak, dan akan sangat ketat sekali. Undangan Sidang Tahunan dan APBN akan sangat sedikit, hanya sekitar 300 orang dari sekitar seribuan kapasitas Gedung Paripurna. Tempat ruang sidang akan dilonggarkan, bahkan undangan dan setiap yang datang wajib menyerahkan hasil *rapid test*. Bahkan untuk petugas dan pihak yang berdekatan dengan Presiden harus melakukan *test swab* terlebih dahulu,” terang Indra.

Tidak hanya itu, lanjut Indra, dalam Sidang Tahunan kali ini juga dilakukan penyederhanaan tidak hanya dari segi orname atau hiasan. Melainkan juga penggabungan antara Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI. Hal tersebut juga untuk menyederhanakan agar Presiden tidak berpidato sebanyak tiga kali sebagaimana biasanya.

Senada dengan Sekjen DPR RI, Kepala Biro Protokol Setjen DPR RI Suratna mengatakan, secara prinsip pihaknya sudah siap menggelar kegiatan tahunan tersebut. Undangan pun sudah disebar ke berbagai pihak, baik undangan fisik dan virtual.

Undangan fisik sebagaimana yang disebutkan Sekjen DPR RI, ada sekitar 310 orang yang akan hadir langsung di Gedung Nusantara DPR RI.

Sementara itu undangan virtual sebanyak 860 yang terdiri dari 378 Anggota DPR RI, dan 89 Anggota DPD RI, sisanya undangan lainnya. Konfirmasi kehadiran tamu undangan virtual dalam rapat tersebut sudah bisa dilakukan sejak tanggal 7 hingga 10 Agustus 2020. Sedangkan tanggal 10-13 Agustus dilakukan konfirmasi ID *meeting* dan *password*. Setelah itu di hari pelaksanaan tanggal 14 Agustus 2020, dibuka pada pukul 07.00 untuk *join meeting* dan pukul 12.00 untuk *join meeting* siang hari.

“Sebagaimana yang disebutkan Bapak Sekjen DPR RI sebelumnya, ada sekitar 310 undangan yang akan hadir secara fisik atau langsung dalam

acara tersebut. dari 310 undangan fisik itu, sebanyak 170 orang merupakan Anggota DPR RI yang terdiri dari Pimpinan DPR RI, pimpinan komisi dan fraksi, serta pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang ada di DPR RI. Sementara untuk DPD RI ada sekitar 48 orang yakni terdiri dari pimpinan dan perwakilan provinsi-provinsi yang ada di seluruh Indonesia, dan Pimpinan MPR sebanyak 20 orang,” jelas Ratno, sapaan akrab Suratna.

Terkait dengan kehadiran tamu-tamu VIP yang notabene merupakan presiden dan wakil presiden terdahulu, Ratno menjelaskan bahwa semuanya hadir secara virtual. Meski demikian tetap ada aspek keprotokolan di dalamnya. Artinya tetap akan ada *greeting* atau ucapan salam dan penyebutan nama kepada para pemimpin bangsa di era sebelumnya. ■ ayu/es



Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar. Foto: Arief/MR

Pengurus DWP Setjen DPR RI Dikukuhkan

Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat Jenderal DPR RI Periode 2020 - 2024 resmi

dikukuhkan. Ketua Pengurus DWP Setjen DPR RI terpilih, Tanti Setyanta Nugraha mengatakan, pihaknya akan terus melanjutkan program-program DWP yang sudah berjalan dalam rangka penguatan pembangunan sumber daya manusia Indonesia secara lebih komprehensif dan terpadu.

“Alhamdulillah hari ini kita sudah dikukuhkan sesuai dengan AD/ART terakhir, bahwa memang setiap Dharma Wanita harus dikukuhkan oleh DWP Pusat. Tentunya ini akan menambah kepercayaan diri kita untuk lebih meningkatkan kegiatan agar eksistensi kita lebih diketahui, terutama

di lingkungan instansi Sekretariat Jenderal,” kata Tanti usai pengukuhan di Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/8).

Pengukuhan dihadiri fisik oleh anggota pengurus dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Erni Guntari Tjahjo Kumolo secara virtual. Untuk menjalankan program DWP ke depannya, Tanti menuturkan ada 3 bidang yang menjadi fokus utama yakni, bidang pendidikan, bidang ekonomi dan bidang sosial. “Ketiganya harus fokus, karena harus beriringan dan sejalan. Namun yang paling utama ialah bidang ekonomi,” ujar Tanti kepada **Parlementaria**.

Dia menambahkan, pemberdayaan di bidang ekonomi menjadi hal penting dalam meningkatkan *capacity*

building istri-istri Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Setjen DPR RI, sehingga nantinya bisa ikut *support* suami dan kesejahteraan para anggota-anggota ASN. Dia juga komitmen akan meningkatkan kegiatan-kegiatan seiring dengan kebutuhan organisasi di lingkungan internal Setjen DPR RI.

“Selama ini kita masih mengikuti apa yang diprogramkan DWP Pusat dan ke depannya, kita akan kerja sama dengan instansi pemerintah lainnya seperti Kementerian Koperasi dan UMKM, untuk memberikan keterampilan lebih bagaimana memberdayakan istri-istri ASN supaya bisa berusaha secara mandiri di rumah,” imbuh Tanti.

Adapun nama-nama Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat Jenderal DPR RI Periode 2020-2024 yang telah dikukuhkan, diantaranya Ririn Wahyandari Suratna, Endang Ismurdiyanti Y.O.I Tahapari, Dwi Widayanti Eguh Setiawan, Iraningsih Suryatna, Endang Ahmad Budiman, Martiasih Nursanti, Ifana Budi Jatnika, Rien Inosentius, Sri Mulyani Frihartomo, Djati M Djazuli, Nunik Rahmad Budiaji, Neno Dimiyati Sudja, Erna Agustina, Ni'mah Wahyu Purnami, Sumini Iding dan Susi Andi Iswanto. ■ ann/sf



Pengukuhan Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat Jenderal DPR RI Periode 2020 - 2024. Foto: Runi/MR



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani usai menerima Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Foto: Eno/MR

Puan Maharani Bahas Penanganan Covid-19 dengan Agus Harimurti Yudhoyono

Penanganan pandemi virus Covid-19 dan dampaknya menjadi materi pembicaraan pertemuan Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Puan memastikan, ia dan Agus sepakat pandemi ini harus diselesaikan secara bergotong royong seluruh elemen bangsa.

“Terkait dengan bagaimana permasalahan penanganan Covid ke depan ini, dan Insya Allah kami sama-sama bersepakat bahwa untuk penanganan Covid ini memang seluruh elemen masyarakat harus bisa ikut berperan serta untuk bisa menangani Covid ini bisa segera berlalu,” ujar Puan usai pertemuan di ruang kerja Ketua DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (6/8).

Agus mengamini pernyataan Puan tentang perlunya kerja sama seluruh elemen bangsa termasuk PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat dalam penanganan pandemi Covid-19. “Saya tadi menyampaikan bahwa Partai Demokrat ingin juga terus berkontribusi baik dalam pemikiran maupun aksi nyata melalui parlemen maupun struktur di lapangan,” kata Agus usai pertemuan.

“Pertemuan berjalan dengan sangat baik, penuh dengan kekeluargaan karena sebetulnya kami juga dulu sering berkomunikasi sebelum masa Covid-19 ini. Tapi dalam kapasitas beliau sebagai Ketua DPR RI dan kali ini saya sebagai Ketua Partai Demokrat ini adalah kali pertama pertemuan antara kami berdua. Terima kasih Ibu Puan dan tentunya tadi diskusi sangat cair,” ungkap Agus.

Puan sendiri berharap silaturahmi dengan Partai Demokrat terus terjalin. “Tentu saja bukanlah yang pertama, namun bukan juga yang terakhir, namun tetap akan melakukan silaturahmi untuk bisa membicarakan bagaimana membangun bangsa ini bersama-sama,” kata Puan.

Dalam kesempatan ini Puan didampingi Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDI-Perjuangan Bambang Wuryanto. Sementara Agus didampingi Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro. Selain membahas tentang penanganan Covid-19, pertemuan yang berlangsung selama 30 menit itu juga membahas konsolidasi Pilkada serentak 2020. ■sf



PIMPINAN dan ANGGOTA DPR RI
serta SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
mengucapkan



DIRGAHAYU REPUBLIC INDONESIA

17 AGUSTUS 1945 - 17 AGUSTUS 2020



INDONESIA
MAJU

